



PENERAPAN SAP 2020

DAMPAK DISRUPSI EKONOMI PADA LK PEMERINTAHAN

PENDAHULUAN

Pada situasi disrupsi kegiatan perekonomian, terjadi peninjauan aspek penerapan Standar Akuntansi Keuangan, termasuk oleh DSAK NKRI.

Makalah ingin menghampiri para pengguna SAP NKRI dengan tujuan meningkatkan kewaspadaan aplikasi SAP dan Bultek SAP pada situasi lingkungan nan berubah.

Paragraf 83 Kerangka Konseptual SAP meminta pengungkapan (1) kondisi lingkungan umumnya,

kondisi ekonomi makro dan kondisi fiskal khususnya dalam LK Pemerintahan,(2) target keuangan versi APBN vs realisasi aktual versi akuntansi, (3) penjelasan kendala/hambatan pencapaian target.

PEMBENAHAN BANGSA PASKA DISRUPSI

Bagi John Meynard Keynes, bila tertimpa krisis ekonomi, negara mungkin perlu ber utang lebih banyak, dan APBN belanja di perbesar. Pemulihan ekonomi AS akibat depresi besar berbasis keterbatasan APBN konon karena hampiran Keynes. Uang adalah pelumas ekonomi paling efektif. Kapitalisme pasar bebas diganti perencanaan *top-down*, melonggarkan APBN dan ekspansi pasok uang beredar. Tatkala pemerintah mencetak uang, pemerintah harus berpura-pura memiliki kekuasaan meningkatkan standar hidup. Strategi kabinet tersaji rapi mempunyai daya pesona dan dukungan publik, apabila perlu merumitkan yang sederhana adalah cara yang baik. Pada situasi krisis, terdapat persamaan ranah mikro (individu, keluarga) dan ranah makro (bangsa, pemerintahan). Dunia usaha suka gagasan uang mudah dan kredit mudah, pada satu sisi meminta dukungan pemerintah, pada sisi lain , lembaga keuangan merekrut ekonom untuk meyakinkan pelanggan / calon pelanggan. Hampiran Keynes populer dikalangan politikus karena tak memangkas layanan pemerintah, populer karena tak menaikkan pajak. Bila konsumsi meningkat menyebabkan ekonomi tumbuh, bukan sebaliknya. Konsep salah dan terbalik; perekonomian tumbuh menyebabkan konsumsi meningkat. Pada situasi stagflasi, tugas pemerintah mendorong tabungan ke bank dengan berbagai jaminan pemerintah, pengurangan pajak penghasilan deposito dll, menambah uang beredar agar jumlah kredit bank tersalur lebih banyak. Ekspansi ekonomi terjadi tatkala skala produksi meningkat. Konsep keliru”belanja mendorong pertumbuhan ekonomi” , konsep benar adalah “ tindakan menabung ketimbang tindakan konsumsi adalah tindakan lebih menguntungkan kondisi perekonomian”. Ketika harga harga mulai turun mendekati lapis masyarakat berdaya beli lemah, pasar mulai berkembang kembali. Memusuhi perusahaan swasta dalam pendanaan infrastruktur adalah keliru, sebab pembangunan infrastruktur

oleh pemerintah sendiri mendapat output suboptimal karena KKN. Karena itu kemitraan swasta-pemerintah dan hampiran konsesi berbagai sarana publik pemerintah kepada swasta adalah jalan keluar. Kebijakan larangan impor untuk penghematan cadangan devisa, kebijakan memusuhi perdagangan bebas untuk melindungi produksi dalam negeri dan lapangan kerja menyebabkan opsi-beli termurah dan terbaik barang/jasa yang ada dimuka bumi, menjadi ditutup bagi rakyat negara itu. Fokus pemerintahan pada ekspansi bisnis dan tabungan, pajak terasa ringan dan mendorong kegairahan ekonomi, mendorong industri sektor riil berkembang subur, kesempatan kerja meningkat menyebabkan daya beli masyarakat meningkat. Persaingan pelaku industri sehat mendorong persaingan harga, peningkatan efisiensi untuk kesinambungan besar laba, menyebabkan indeks harga komoditas umum menurun, menyebabkan kecukupan belanja konsumtif bagi keluarga. Kelebihan itu menyebabkan pergeseran alokasi belanja konsumtif menjadi belanja rekreasi, belanja semi produktif dan belanja produktif, seperti pembangunan rumah untuk sewa bulanan dan kendaraan sewaan. Belanja rekreasi menumbuhkan industri jasa. Terjadi kebutuhan publik akan sistem demokrasi, para pemilih dalam pemilu mengevaluasi kualitas penggunaan kekuasaan, kualitas manajemen APBN, terutama alokasi, kebocoran dan pertanggungjawaban pemerintahan berbasis akuntansi pemerintahan yang baik. Muncul PNS sebagai golongan baru dalam masyarakat, dan jabatan anggota DPR menjadi menarik, muncul perlombaan menarik hati masyarakat melalui subsidi, upaya menekan harga kebutuhan pokok dan upaya penggratisan kebutuhan publik tertentu, sebagian memang upaya sehat, sebagian populis. Terdapat berbagai bencana alam, yang disikapi oleh kebijakan khusus dan APBN khusus dalam upaya pemerataan dan keadilan antara lain berbagai fasilitas keringanan perpajakan tahun 2020. Pada berbagai negara lain, Menteri Tenaga Kerja pengejar popularitas membuat pengetatan syarat PHK yang memberatkan para pengusaha, menciutkan hati para wirausaha baru akan coba-coba, berakibat bisnis berhenti berkembang.

Bagi Menteri keuangan dan Gubernur bank sentral, pasok uang beredar merupakan penyebab inflasi nan-utama. Resesi atau kelesuan ekonomi ditengarai toko-toko tutup juga pada hari Minggu, resesi seharusnya berdampak deflasioner. Dengan demikian *inflasi berbasis cetak uang kartal baru* amat mudah ditengarai tatkala pengangguran meningkat, daya beli turun, dan jumlah pembelian komoditas kebutuhan pokok sehari-hari menurun. Pada tataran teori ekonomi, sebagai pakar ilmu ekonomi berpendapat bahwa inflasi dan pengangguran tak mungkin terjadi bersamaan, akan terbukti keliru, apabila pemerintah menetapkan "obat utama resesi adalah mencetak uang". Bila demikian, pemerintah mencipta kondisi resesi ber-inflasi, atau stagflasi. Makin besar pengangguran sebuah bangsa, makin sedikit pekerja produktif, makin sedikit pula output sektor riil bangsa itu, sehingga mengakibatkan penurunan sisi penawaran. Apabila ditambah peningkatan jumlah uang beredar akibat mencetak uang, maka harga-harga kebutuhan pokok akan kian melambung.

Belanja pemerintah terlampau besar menyebabkan upaya peningkatan pendapatan pajak, berdampak menurunkan produktivitas bangsa dan kegairahan roda ekonomi

REFOKUS PENGGUNAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA ERA DISRUPSI

Pada periode disrupsi sosial dan perekonomian 2020, pengutamaan akuntabilitas dan transparansi¹ dalam Kerangka Konseptual SAP menjadi topik penting bagi pemangku kepentingan, membutuhkan banyak sekali informasi tambahan² periode disrupsi.

¹ Kerangka Konseptual Paragraf 26

² Kerangka Konseptual Paragraf 20,36, 38.

Dibutuhkan hampiran baru pelaporan pertanggungjawaban keuangan periode disrupsi kabinet kepada DPR³, terkait (1) penyusunan APBNP, (2) jadwal pelaporan ringkas-cepat realisasi APBN periode gawat darurat 2020 tanpa LK, dan (3) perubahan kebijakan transfer, distribusi pungutan pajak, PBB dan sebagainya kepada Pemda, dan (4) perubahan berbagai PMK tentang kebijakan perpajakan, pengawasan dan pemeriksaan pajak, serta (5) PMK perubahan penerapan SAP NKRI yang di inisiasi / di usulkan oleh APK Depkeu, misalnya (5.1) Kebijakan Penyusutan /Amortisasi Aset Tetap Berwujud dan Aset Tetap Nirwujud, (5.2) Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir, (5.3) Pengungkapan pada CALK dalam LK per 31 Desember 2019 dan 2020 tentang berbagai hal (antara lain LAK dan LO tentang penurunan alokasi Transfer APBN kepada Pemda, alokasi BOS, alokasi Hibah, akuntansi valuta asing, penurunan pendapatan Pajak dan PNBPN tertentu, penagihan piutang pemerintah kepada swasta, Obligasi negara, SUN dan utang negara pada pihak asing jatuh tempo 2020) yang tak mungkin dapat direalisasi⁴ tahun 2020 sebagai peristiwa setelah tanggal neraca pada LK tahun 2019.



NERACA DAN CALK

Untuk audit LK Pemerintahan yang berakhir 31 Desember 2019 yang sedang di audit BPK dewasa ini, diramalkan dikembalikan oleh BPK kepada auditee agar disesuaikan lebih dahulu dengan kondisi disrupsi kegiatan sosial-ekonomi dan pemerintahan tahun 2020, terutama revisi Laporan Neraca 31 Desember 2019 tentang berbentuk piutang pemerintah yang dipastikan tak mungkin dapat direalisasi.

Worst case scenario, terdapat kemungkinan kebutuhan bantuan IMF untuk (1) menutup risiko default utang negara jatuh tempo, (2) membiayai APBN untuk aktivitas berbangsa-bernegara, (3) revitalisasi industri perbankan dan pasar modal, (4) pembangunan unit usaha yang terancam pailit, sektor kolaps dan pembangunan lapangan kerja, yang tak boleh membebani generasi selanjutnya⁵. Sejarah NKRI mencatat bahwa Pemerintah upaya keras mengembalikan utang IMF dalam tempo sesingkat-singkatnya.

³ Kerangka Konseptual Paragraf 9

⁴ Paragraf 87 Kerangka Konseptual

⁵ Paragraf 17 (d) Kerangka Konseptual tentang keseimbangan antargenerasi.

Apabila ketertagihan pos tertentu menjadi tak menentu karena situasi sosial dan ekonomi tak menentu, maka LK berbasis akrual⁶ berdasar nilai perolehan historis berisiko berbeda (jauh lebih besar, *overstated*) dibanding hasil realisasi dalam periode resesi atau stagflasi, perlu penjelasan pada CALK atau revisi saldo piutang pajak dan bukan pajak di Laporan Neraca tahun buku 2019. Pendapatan berjenis piutang diakui pada LO tatkala terdapat kepastian berderajat masuk-akal tentang ketertagihannya, karena perubahan situasi lingkungan disruptif ; maka derajat ketertagihan berisiko tiba-tiba tidak masuk akal sebagian mungkin terprediksi setelah tanggal neraca. Para akuntan pemerintahan juga perlu meneliti ulang pos investasi jangka panjang dan jangka pendek terkait kondisi pasar-modal dan kejatuhan harga properti investasi akibat resesi, pos persediaan , kewajiban jangka panjang dan pendek , terkait situasi disrupsi paska tanggal neraca 31 Desember 2019 yang mungkin berdampak pada pos ekuitas. Berbagai Pemda menempatkan investasi jangka pendek berbentuk deposito berjangka sampai 12 bulan pada bank swasta yang berisiko pailit, sebaiknya mengungkapkan pada CALK. Investasi pemerintah berbentuk efek perusahaan publik LN/DN juga harus dipantau sepanjang masa disrupsi , berita buruk kepailitan emiten DN/LN tersebut harus diungkapkan pada CALK. Apabila investasi kritis tersebut tak dapat ditunaikan seluruhnya, harus dihapus (*write off*) dari pembukuan entitas pemerintahan. Janji penunaian efek tersebut di catat sebagai bakalan nilai realisasi bersih yang baru⁷, nilai buku investasi diturunkan sampai sebesar janji , kerugian penurunan nilai investasi di catat dan dilaporkan pada LO. Investasi berbentuk surat berharga Obligasi Negara atau SUN terkait kondisi keuangan BI, relatif aman.

Perubahan nilai rupiah pos moneter karena translasi pos tunai-bank dalam valas, piutang dalam valas, kewajiban dalam valas menjadi Rupiah pada Laporan Neraca dilaporkan pada CALK.

Dari seluruh komponen LK termaktub pada Paragraf 14 Kerangka Konseptual, hal tersebut diatas mungkin berpengaruh pada hampir semua jenis komponen LK, terutama Laporan Neraca , CALK , LRA , LAK dan LO. LRA dan LAK akan dipengaruhi perubahan kurs sepanjang masa disrupsi.

Bila terjadi APBNP/APBDP tengah tahun 2020 tersesuai disrupsi ekonomi dan pemerintahan, LK interim tahun buku 2020 sebaiknya disajikan SE&O sampai tanggal berlaku efektif APBNP/APBDP. Sebagai misal, LK interim per tanggal 30 Juni 2020 dibuat untuk ukuran kinerja APBN/APBD Semester I Tahun 2020, periode akuntansi baru pada tanggal 1 Juli 2020 sesuai tanggal mulai efektif APBNP/APBDP sebagai tolok ukur baru bagi kinerja keuangan.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pada masa disrupsi ekonomi dan pemerintahan, terjadi perubahan mendasar penganggaran dan LRA, dengan perubahan dahsyat pada Pendapatan LRA , yang menyebabkan perubahan dahsyat belanja dan transfer. Surplus LRA dan SiLPA diramalkan tak pernah terjadi lagi , defisit LRA , makin membutuhkan pertanggungjawaban dan mulai berisiko ancaman tindak pidana, penerimaan pembiayaan makin sulit menyebabkan penurunan drastis pengeluaran pembiayaan. Aksi dan upaya memperbesar pendapatan LRA dilakukan dengan segala akal dan cara, padahal APBN pemeriksaan/penagihan pajak menurun. Pada masa pencutian APBN/D tahun 2020 dst, pemerintah pusat diramalkan menghimbau pemerintah daerah agar memperkecil jumlah SDM dan Satker Pemda dengan meningkatkan produktivitas kerja dan elektronisasi segala kegiatan, mengruangi belanja pegawai dan belanja barang, tetap berupaya meningkatkan belanja modal. Belanja Bansos, BOS, Hibah, BPJS , belanja pajak dan subsidi diramalkan akan ditekan sampai minimum pada tataran pemerintah pusat cq Kementerian / Lembaga dan pada tataran Pemda. Pada berbagai rapat APBN/D,

⁶ Paragraf 2 Pernyataan 01, Penyajian LK.

⁷ Sejalan Paragraf 67PSAP 01

diramalkan belanja berbasis fungsi makin didominasi Belanja Kesehatan, Belanja Perlindungan Sosial dan Belanja pelayanan Umum. Pada situasi sulit APBN/D , Inspektorat Jenderal , APIP, BPKP dan BPK makin berperan penting dalam 3E pengadaan dan tender.

LAPORAN ARUS KAS

Audit Kinerja makin terfokus pada aktivitas investasi, kinerja pimpinan entitas makin diukur dengan kapasitas memperoleh pendanaan, aktivitas operasi berbasis kegiatan makin dituntut berbasis hasil dan dampak. Aktivitas operasi paska 2020 akan makin terfokus pada (1) elektronisasi segala kegiatan pemerintahan berbasis kecerdasan-artifisial, dalam lima tahun kedepan memangkas biaya pegawai dan biaya operasi K/L terutama Pemda sampai 50%, (2) penciptaan pendapatan operasional nirkomersialisasi-layanan-umum berbasis KPBU Pelisensian berbagai fasos-fasum kepada Swasta⁸. Kementerian BUMN diramalkan mendapat tugas perbesaran sumbangan BUMN kepada APBN.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Disrupsi mungkin perlu diungkapkan dalam konteks sebagai berikut

1. Dampak disrupsi pada pendapatan dan penagihan piutang
2. Dampak disrupsi pada belanja operasional terutama operasi penanggulangan bencana
3. Dampak disrupsi pada belanja modal terutama sarana penanggulangan bencana
4. Dampak disrupsi pada belanja barang terutama untuk penanggulangan bencana
5. Dampak disrupsi pada belanja pegawai terutama SDM penanggulangan bencana

⁸ Kita ingat Bandara Utama SriLanka dilisensikan kepada RRC selama 100 tahun , sebagai pemicu pembangunan perekonomian dan modernisasi .

6. Dampak disrupsi pada belanja bunga terutama karena pembiayaan penanggulangan bencana
7. Penghapusan aset karena tiba tiba mubazir karena bencana
8. Pendapatan haircut atau pembebasan utang dari pada kreditur
9. Pembayaran sanksi, bunga, denda keterlambatan pembayaran utang akibat kekurangan dana APBN/D.
10. Dampak disrupsi pada pemutusan hubungan, misalnya KPBU, karena tak sanggup memenuhi syarat kontrak
11. Dampak disrupsi pada LO, terutama pendapatan
12. Dampak disrupsi pada LRA dan LAK
13. Dampak disrupsi pada ekuitas, analisis Laporan Perubahan Ekuitas
14. Risiko kepailitan/kebangkrutan, risiko di tuntutan dipengadilan internasional/nasional
15. Penciutan aset strategis/produktif entitas pemerintahan dan penurunan kapabilitas entitas, penciutan organisasi pemerintahan berbasis Revolusi Industri

PENUTUP

Diramalkan tak ada masalah kesinambungan usaha (*going concern*) bagi entitas pemerintahan NKRI karena disrupsi kegiatan sosial dan perekonomian sepanjang 2020. Diramalkan terjadi realokasi APBN/D besar besaran pada medio 2020.

Keandalan pengukuran⁹ merupakan topik utama akuntansi pemerintahan tahun 2020 walaupun pos-pos dalam LK menggunakan nilai perolehan historis sesuai Paragraf 89 Kerangka Konseptual, bukan basis nilai wajar .

Pada periode godaan untuk berutang pada IMF, basis akuntansi akrual sejak 2015 , terutama untuk akuntansi utang-piutang menjadi makin penting . Prinsip Nilai Historis¹⁰ tentu saja makin relevan situasi terkini 2020 jauh lebih dapat diandalkan ketimbang prinsip nilai wajar versi IPSAS/IFRS pada situasi tak menentu, Prinsip Nilai Realisasi¹¹ makin relevan mengatasi azas laba paripurna versi pasar modal .Prinsip nilai realisasi terkait risiko penurunan luar biasa realisasi pendapatan pajak dan PNBK tahun 2020, serta perubahan pendapatan migas NKRI terkait (1) perubahan harga migas pasar global dan (2) perubahan model/basis perjanjian yang baru bagi minyak dan gas bumi, amat relevan zaman.

Jakarta, April 2020

⁹ Paragraf 88 dan 89 Kerangka Konseptual.

¹⁰ Paragraf 46 Kerangka Konseptual.

¹¹ Paragraf 48 dan 49 Kerangka Konseptual.